

## ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PELAYANAN DISABILITAS DI KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA

Muhammad Arif Ramadhan<sup>1\*</sup>, Ani Heryani<sup>2</sup>, Ari Ramdani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STIA YPPT Priatim Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

\*Korespondensi: dosenmuda1983@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Adaptive Governance dalam Pelayanan Disabilitas di Kecamatan Mangkubumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami konsep *adaptive governance* dalam pelayanan disabilitas di Kecamatan Mangkubumi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini adalah terdapat variasi lembaga yang terlibat, terdapat komunitas Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) yang berasal dari komunitas masyarakat. Sehingga dirasakan perlu adanya penguatan lembaga formal dan informal dalam menangani isu disabilitas di Kecamatan Mangkubumi dengan berkolaborasi, dan mendorong adanya tata kelola yang responsive dan inklusif terhadap penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Adaptive Governance, Disabilitas, Pelayanan Publik

### ABSTRACT

*This research is entitled Adaptive Governance in Disability Services in Mangkubumi District. The purpose of this study was to identify and understand the concept of adaptive governance in disability services in Mangkubumi District. The research method used is descriptive qualitative by using interview, observation and documentation studies. The findings in this study are that there are variations in the institutions involved, there are Community Based Rehabilitation (RBM) communities that come from the community. So it is felt that there is a need to strengthen formal and informal institutions in dealing with disability issues in Mangkubumi District by collaborating, and encouraging responsive and inclusive governance for persons with disabilities.*

**Keywords:** Adaptive Governance, Disability, Public Service

#### A. PENDAHULUAN

Dalam kajian Ilmu Administrasi Publik, pelayanan publik merupakan isu yang strategis untuk diteliti, karena pelayanan publik merupakan ruang interaksi antara pemerintah selaku penyedia layanan dengan masyarakat selaku pengguna layanan. Dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisakan pelayanan publik berdasarkan sumber pembiayaan dan sifat penyelenggaraannya, Padahal semestinya pelayanan publik didefinisikan berdasarkan barang dan jasa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan warganya, disamping itu

barang dan jasa tersebut seharusnya dapat menjadi bagian dari misi atau tujuan negara dan hal tersebut seharusnya merupakan orientasi dari penyelenggaraan pelayanan publik. (Dwiyanto, 2015)

Sebagai negara kesatuan yang desentralistik, diversivitas kebutuhan barang dan jasa publik merupakan keniscayaan, pemerintah mesti memanfaatkan diversitas tersebut sebagai khasanah sumber inspirasi dalam mengembangkan inovasi manajemen pelayanan publik, yang semula mekanis menjadi adaptif. Agar dapat lebih terbuka dan menyesuaikan terhadap variabilitas kebutuhan dan kendala pengguna dalam mengakses pelayanan publik.

Faktor lain yang mengakibatkan variabilitas kebutuhan masyarakat salah satunya adalah perubahan ekologi sosial, yang saat ini mempengaruhi gaya hidup masyarakat untuk dapat memilih gaya hidupnya sendiri, yang selanjutnya menuntut pelayanan publik yang beragam. Perubahan ini perlu direspon secara wajar oleh birokrasi jika tidak ingin kehilangan relevansinya dalam memberikan layanan kepada warga pengguna. Salah satu fenomena sosial yang terjadi dan perlu di respon oleh pemerintah adalah para penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan yang bersifat khusus.

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018, populasi penyandang diabilitas yang dikategorikan berat hingga sedang di Indonesia mencapai 30 juta orang. Sedangkan berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus mencapai 21 juta orang. Maka berdasarkan populasi disabilitas tersebut, mestinya terdapat pelayan yang bersifat khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi sosial penyanang disabilitas.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, berdasarkan hasil konfrensi UNCRPD (*UN Convention On The Rights Of Person With Disabilitis*) bahwa secara garis besar disabilitas merupakan hasil interaksi seseorang dengan perilaku dan lingkungan yang dapat menghambat aktivitas secara utuh dan efektif. Sangat lah penting disabilitas tidak hanya dipandang sebatas kondisi medisnya saja, tetapi juga pada sisi sosio ekologi dimana interaksi antar manusia dan lingkungan terjadi.

Tantangan yang mesti dihadapi pemerintah saat ini adalah menciptakan lingkungan yang inklusif bagi mereka serta dapat memudahkan partisipasi mereka di tengah lingkungan masyarakat, kemudian menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama pada layanan publik, pendidikan, kesehatan, pasar kerja dan pengembangan keterampilan. Diperlukan Tata kelola pemerintah yang adaptif dalam merespon perkembangan isu disabilitas ini. perlu adanya kebijakan, layanan dan program yang khusus ditentukan untuk mengembangkan penyandang disabilitas pada lingkungan masyarakat. Namun isu disabilitas juga tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Disabilitas merupakan *common and public problem* yang menuntut adanya intervensi kolektif sebagaimana menjadi bagian dari kajian administrasi publik.

Di Kota Tasikmalaya sendiri peran penyandang disabilitas pun dalam interaksi sosial dan lingkungan masih seringkali

dikesampingkan, hal itu dapat terlihat pada fasilitas publik di beberapa titik di Kota Tasikmalaya yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta penyandang disabilitas masih dipandang tidak berperan dalam kehidupan masyarakat. tercatat di kota tasikmalaya berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya di tahun 2019 terdapat 3.462 penyandang disabilitas yang tersebar di 10 Kecamatan. Dan Kecamatan dengan angka disabilitas tertinggi terdapat di Kecamatan Mangkubumi dengan 420 jiwa penyandang disabilitas.

Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa Kecamatan Memiliki tugas untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah yang kemudian diarahkan agar mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan, peningkatan pelayanan dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kecamatan Mangkubumi dalam merespon isu disabilitas yang terjadi di wilayahnya melakukan kerja sama dengan lembaga formal dan informal yang ada di luar jajaran pemerintahan. Seperti melakukan Koordinasi dengan Puskesmas untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kapasitas kesehatan masyarakat guna meminimalisir anak lahir stunting dan atau disabilitas. Serta melakukan koordinasi dengan lembaga lembaga lain yang memiliki kepentingan yang sama pada isu disabilitas.

Disamping itu juga terdapat komunitas masyarakat lokal yang

terkumpul dalam Komunitas Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM), yang ikut serta menangani permasalahan disabilitas yang ada di Kecamatan Mangkubumi. Komunitas tersebut di gagas oleh LAKPESDAM NU Kota Tasikmalaya, untuk dapat mendorong terwujudnya lingkungan yang inklusif di tingkat warga masyarakat, sehingga penyandang disabilitas dapat memiliki peran dan diakui keberadaannya pada lingkungan nya.

Sejauh ini beberapa program yang dijalankan pun telah memberikan manfaat positif bagi penyandang disabilitas, seperti home visit untuk melakukan pendataan bagi penyandang disabilitas, kemudian melakukan advokasi aksesibilitas anak baik pada layanan kesehatan atau pun pendidikan, layanan tearpis serta penguatan pemahaman kepada orang tua dan lingkungan sekitar terkait pola asuh yang baik dan benar bagi anak disabilitas. Sejauh ini RBM masih berfokus kepada layanan anak disabilitas dan belum menyentuh penyandang anak disabilitas dewasa.

Bervariasinya pemangku kepentingan yang ada dalam menangani isu disabilitas di Kecamatan Mangkubumi menjadi potensi Pemerintah Kecamatan untuk dapat mengorganisasikan kepentingan dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap kelompok kepentingan ke dalam sebuah bentuk tata kelola yang adaptif.

Menurut (Ronald D. Brunner et al., 2005) dalam menjelaskan konsep Adaptive Governance bahwa konsep tersebut mendorong hasil kebijakan yang mengintegrasikan birokrasi dan kebijakan berbagai pemangku kepentingan lintas

sektor, serta menggunakan ilmu pengetahuan sebagai basis dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil merupakan keputusan yang inklusif yang menyertakan pendapat berbagai ahli, serta memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi.

Dalam konteks pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Mangkubumi, konsep Adaptive Governance erat kaitannya dengan apa yang menjadi harapan para penyandang disabilitas, masyarakat, serta para pemangku kepentingan yang terlibat. Pemerintah Kecamatan dituntut untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dan menentukan kebijakan berdasarkan analisis yang cermat. Oleh karena itu dirasakan penting untuk mengintegrasikan kebijakan, karena kepentingan satu kelompok masyarakat bisa jadi berkaitan dengan kelompok kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan terdapat beberapa fenomena yang memiliki keterkaitan dengan konsep dari Adaptive Governance, yaitu: 1). Terdapat kelompok kepentingan baik formal ataupun informal dalam pelayanan disabilitas di Kecamatan Mangkubumi; 2) Terdapat keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan adaptive governance dalam pelayanan disabilitas di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Kajian Adaptive Governance dalam kurun waktu 2019-2022 telah banyak diteliti terutama yang dikaitkan

dengan topik perubahan lingkungan (Bryndum-Buchholz et al., 2021; Fox, 2021; Greenhill et al., 2020; Grügen, 2020; MAZZEO, n.d.; Mumtaz & Ali, 2019; Rechkemmer, 2021; Rusnaedy et al., 2021; Vasseur, 2021).

Penelitian Adaptive Governance yang dikaitkan dengan sistem lingkungan sosial pun sudah banyak dilakukan diantaranya oleh (Abrahamsz & Lopulalan, 2019; Assche et al., 2019, 2022; Echaubard et al., 2020; Edelman et al., 2020; Edwards et al., 2019; Epstein et al., 2021; Folke, 2019; May, 2022; McGlynn, 2022; Porras, 2019; Wallrapp et al., 2019; Zia, 2019).

Sedangkan penelitian Adaptive Governance yang dikaitkan dengan Pembangunan Berkelanjutan telah banyak dilakukan oleh para peneliti seperti: (Akamani, 2020; Nahar & Mishra, 2019; Tulaeva, 2022).

Namun, penelitian adaptive governance yang dikaitkan dengan disabilitas dalam pelayanan belum banyak diteliti. Sehingga topik inilah yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

*Adaptive Governance* merupakan konsep yang dapat dipergunakan sebagai acuan atas penyelenggaraan pemerintah baik dipusat maupun di daerah. Yang menekankan pada kemampuan pemerintah dalam menyikapi sesuatu sesuai dengan perkembangan jaman. Konsep ini pun mendorong output kebijakan atas dasar integrasi birokrasi dan kebijakan pada lintas sektor, serta ilmu pengetahuan yang difungsikan sebagai acuan pengambilan keputusan. Keputusan yang di ambil sejatinya keputusan yang inklusif atau terbuka serta mamapu memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan

terjadi. Hal ini menerangkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan pada konsep ini, ilmu pengetahuan merupakan bagian terpenting bagi setiap stakeholder dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Adaptive Governance* yang dikemukakan oleh (Sharma-Wallace et al., 2018) terdapat 8 karakteristik dari konsep *Adaptive Governance*, karakteristik tersebut terdiri dari : *Meaningful Collaboration Across Actors And Scale; Effective Coordination Between Stakeholders And Level; Building Social Capital; Community Empowerment And Engagment; Capacity Development; Linking Knowledge And Decision Making Through Data Collection And Monitoring; Promoting Leadership Capacity; Exploiting Or Creating Governance.*

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Wilayah kerja Kecamatan Mangkubumi, dengan objek utama penelitiannya adalah Komunitas Rehabiltasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) yang dibawah oleh Kasi Kesra Kecamatan Mangkubumi. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara porpositive sampling.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Kolaborasi lintas sektor dan tingkat** (*meaningful collaboration across actors and scale*)

Dengan munculnya konsep *Governance* pada beberapa dekade terakhir ini, memunculkan adanya keterlibatan

berbagai stakeholder untuk dapat ikut serta berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka pembangunan. Adanya pihak swasta, masyarakat lembaga swadaya masyarakat dan Non Governmental Organisation (NGO) yang ikut membantu pemerintah, mengingat tidak semua aktivitas mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri, terutama dalam hal ketersediaan SDM dan sumber daya finansial, sehingga perlu adanya keterlibatan berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut. Pada dimensi ini meninjau keterlibatan berbagai pihak yang terlibat serta mengidentifikasi kepentingan serta peran serta nya dalam suatu tata kelola.

Dari hasil penelitian dilihat dari aspek keterlibatan berbagai pihak, teridentifikasi bahwa bervariasi lembaga yang terlibat dalam pelayanan disabilitas di Kecamatan Mangkubumi. Adapun lembaga tersebut terdiri dari: Pemerintah Kecamatan Mangkubumi, Puskesmas Kecamatan Mangkubumi, Komunitas Rehabiltasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM), dan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Lembaga yang terlibat tersebut merupakan lembaga yang terdiri dari lembaga formal dan informal, disamping ke 4 lembaga tadi ada pula lembaga yang tidak secara langsung ikut serta dalam pelayanan disabilitas di Kecamatan Mangkubumi, yaitu Lakpesdam NU Kota Tasikmalaya. Lakpesdam menggagas untuk adanya suatu komunitas masyarakat yang menjadi tokoh utama dalam menangani serta melayani penyandang disabilitas di Kecamatan Mangkubumi, komunitas tersebut adalah komunitas Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) yang secara nama nya

berarti Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat.

Pemerintah Kecamatan sendiri memiliki tanggung jawab untuk dapat menangani tingginya angka disabilitas di kecamatan mangkubumi. Disamping itu pula pemerintah kecamatan merupakan salah satu perangkat pemerintah kota yang berkewajiban proaktif mendukung terselenggaranya pelayanan bagi penyandang disabilitas. Namun dalam hal ini pemerintah kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk dapat memasukan program layanan disabilitas secara insidental, terlebih dalam hal ini pemerintah kecamatan tidak memiliki kekuasaan anggaran untuk dapat membantu dari sisi finansial. Pemerintah kecamatan lebih memilih untuk mendisposisikan kepada kelurahan dimana kelurahan memiliki kuasa anggaran untuk dapat mengalokasikannya pada agenda pemberdayaan masyarakat serta mendorong kepada kelurahan untuk dapat melahirkan komunitas masyarakat yang membantu menangani permasalahan disabilitas di Kecamatan Mangkubumi.

Kemudian terdapat Komunitas Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) yang muncul dari masyarakat berkat dorongan Lakpesdam NU Kota Tasikmalaya. Komunitas Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) ini bertindak untuk melakukan pendampingan kepada anak disabilitas, mengadakan layanan terapis, melakukan penguatan keluarga dan masyarakat dalam pola asuh khusus bagi anak disabilitas, melakukan advokasi agar anak disabilitas mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan perlakuan yang sama di lingkungannya masing masing. Dalam hal aksesibilitas

pendidikan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) melaksanakan koordinasi dengan sekolah-sekolah formal yang ada di wilayah Kecamatan Mangkubumi untuk dapat memberikan akses pembelajaran yang inklusif bagi anak dengan disabilitas, meminta agar anak disabilitas ini diikutsertakan dalam pembelajaran formal seperti layaknya anak-anak lain, hal ini diharapkan dapat menekan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Kemudian juga melakukan advokasi dibidang kesehatan, Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) membantu anak-anak disabilitas untuk mendapatkan jaminan kesehatan dengan mengajukannya kepada pihak-pihak yang terlibat. Untuk Lakpesdam sendiri hanya melakukan koordinasi dan penguatan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan melakukan pembinaan kepada pengurus Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM).

Kemudian peran Dinas Sosial tentu saja memiliki peran penting dalam penanganan disabilitas, Dinas Sosial sering kali membantu untuk mendapatkan akses bantuan alat-alat kesehatan, kemudian ikut serta mendorong Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) untuk memberikan aksesibilitas di bidang pendidikan dan kesehatan bagi anak dengan disabilitas di tingkat Kota Tasikmalaya.

## **2) Koordinasi yang efektif antar aktor dan tingkat (*effective coordination between stakeholders and level*)**

Pada dimensi ini bentuk koordinasi yang dipraktikan bersifat komunikasi dua arah, hanya saja koordinasi yang



dipraktikan hanya menyentuh lembaga-lembaga terdekat pada tingkatannya saja, Pemerintah Kecamatan sering kali melakukan koordinasi kepada Puskesmas untuk menanyakan terkait kondisi kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan mangkubumi. Dengan diselenggarakannya Loka Karya Lintas Sektor yang secara rutin, telah terjadi dialog antar lembaga yang memiliki kepentingan yang sama dalam hal kesehatan. Dilihat dari perannya Pemerintah Kecamatan dan Puskesmas tidak secara khusus menangani permasalahan disabilitas yang terjadi, tetapi melakukan penguatan dalam hal kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, Pemerintah Kecamatan memandang bahwa faktor kesehatan memungkinkan anak lahir dengan kondisi disabilitas.

Disamping itu juga untuk memberikan pelayanan dan penanganan disabilitas, pemerintah Kecamatan Mangkubumi melakukan Koordinasi dengan Komunitas RBM Kecamatan Mangkubuni melalui Seksi Kesra Kecamatan, karena dalam hal ini pemerintah kecamatan tidak memiliki program khusus untuk menyelenggarakan layanan disabilitas. Meski RBM lebih berfokus kepada layanan anak dengan disabilitas, tetapi RBM sendiri membantu Pemerintah Kecamatan untuk mendata banyak nya anak disabilitas dan mengetahui kondisi sosial lingkungan anak disabilitas. Penulis menemukan adanya dua garis koordinasi, pertama pada tingkatan Kecamatan dan kemudian pada tingkatan Kota Tasikmalaya, pada tingkatan ini yang melakukan koordinasi adalah Dinas Sosial dengan Lakpesdam NU Kota Tasikmalaya hal ini dilakukan

agar dapat kesepahaman terkait pelayanan disabilitas di setiap tingkatan.

### **3) Membangun modal sosial (*building social capital*)**

Dalam hal membangun modal sosial Komunitas RBM sendiri memiliki SK yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, hal ini sebagai bentuk keseriusan dari Komunitas RBM agar dapat dipercaya akan keberadaannya. Untuk selanjutnya cara pemerintah kecamatan dengan RBM membangun kepercayaan dan keakraban satu sama lain, struktur anggota Komunitas RBM nya pun di ambil dari para tokoh masyarakat dan juga kader posyandu yang memiliki kepedulian terhadap anak dengan disabilitas, dan kemudian untuk membangun agar dapat saling bersama-sama peduli terhadap disabilitas, Lakpesdam NU dan juga RBM sering menjelaskan data dan kondisi penyandang disabilitas di Kecamatan Mangkubumi, hal ini dapat membangun perasaan yang sama para aktor yang terlibat ataupun masyarakat lainnya.

### **4) Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat (*community empowerment and engagment*)**

Pada dimensi ini penulis telah menemukan adanya keterlibatan masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pelayanan disabilitas di kecamatan mangkubumi, dengan terbentuknya Komunitas RBM yang anggotanya pun merupakan masyarakat Kecamatan Mangkubumi sendiri, yang telah mengetahui betul kondisi disabilitas di Kecamatan Mangkubumi. selain itu juga dalam program yang dijalankan oleh komunitas RBM tersebut terdapat penguatan masyarakat dengan melakukan

sosialisasi terkait pola asuh anak disabilitas. RBM sendiri mengutamakan peran serta masyarakat sekitar sebagai sumber daya utama untuk menciptakan situasi sosial yang inklusif. Secara umum RBM sendiri diartikan sebagai upaya untuk dapat memulihkan keberfungsian orang yang mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun sosial dengan bertumpu pada peran keluarga dan kelompok masyarakat, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi dan sumberdaya masyarakat. Sehingga dalam hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kecamatan telah mengakomodir elemen masyarakat dengan telah dibentuknya komunitas RBM, serta respon masyarakat pun mendukung adanya komunitas tersebut terlebih bagi keluarga anak disabilitas.

##### **5) Pengembangan kapasitas (*capacity development*)**

Pengembangan kapasitas sendiri merupakan suatu upaya peningkatan sumber daya yang dimiliki dengan sebelumnya telah mengkalkulasi kapasitas yang dimiliki, hal ini dilakukan agar dapat menginventarisir aspek mana saja yang perlu untuk dikembangkan. Dalam penelitian kali ini penulis menemukan terbatasnya pemerintah kecamatan untuk dapat membantu berjalannya kegiatan RBM, pemerintah kecamatan tidak dapat mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimiliki karena RBM ini merupakan bukan program dari kecamatan. Kemudian pemerintah kecamatan sendiri tidak memiliki kuasa anggaran sehingga program dan kegiatan yang disusun ditingkat kecamatan pun terbatas. Namun pemerintah kecamatan telah menyarankan

agar dapat memasukan program RBM ini sebagai program prioritas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masyarakat di tingkat RT dan RW harus menganggap penting keberadaan program tersebut sehingga menjadi harapan prioritas masyarakat di tingkat RT RW karena Musrembang sendiri itu berawal dari masukan masyarakat terkait apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Kemudian komunitas RBM dalam usaha peningkatan kapasitasnya, RBM sering mengadakan sosialisasi penguatan masyarakat dengan terus memberikan pemahaman terkait permasalahan disabilitas yang ada, hal ini diharapkan masyarakat peduli akan keberadaan anak disabilitas dan serta mendorong terciptanya kondisi sosial yang inklusif.

##### **6) Menghubungkan pengetahuan dan pengambilan keputusan melalui pengumpulan dan pemantauan data. (*linking knowledge and decision making through data collection and monitoring*)**

Pada dimensi ini pemerintah kecamatan melakukan kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Mangkubumi agar dapat menyelenggarakan Loka Karya di setiap kurun waktu tiga bulan satu kali, di dalam loka karya tersebut terdapat lintas sektor yang terlibat dalam hal kesehatan di tingkat Kecamatan Mangkubumi. loka karya tersebut merupakan bentuk sharing pengetahuan perkembangan kesehatan masyarakat, dimana di dalamnya membahas juga terkait disabilitas. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengumpulan informasi untuk dapat menangani permasalahan kesehatan. Kemudian RBM juga sering melakukan



home visit untuk melakukan pengecekan ke lapangan terkait permasalahan para anak disabilitas. Hal ini dilakukan untuk mengadovaksi anak disabilitas supaya mendapatkan aksesibilitas pendidikan, kesehatan serta perlakuan yang sama di lingkungannya. Sebagian besar anak dengan disabilitas itu lahir dari keluarga yang berkecukupan, sehingga RBM merasa harus ikut serta dalam melakukan pendampingan terhadap anak disabilitas.

**7) Mempromosikan kapasitas kepemimpinan (*promoting leadership capacity*)**

Pada dimensi ini penulis mengidentifikasi bahwa pemerintah kecamatan merupakan leading sector untuk dapat mengkoordinasikan para aktor yang terlibat dalam pelayanan disabilitas di Kecamatan Mangkubumi, peran kecamatan selaku perangkat pemerintah yang seharusnya dapat proaktif dalam mendukung terciptanya tata kelola yang adaptif dalam pelayanan disabilitas, serta mampu mewujudkan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan dimensi ini penulis menilai bahwa, pemerintah kecamatan belum maksimal dalam mengkoordinasikan aktor-aktor yang terlibat dalam pelayanan disabilitas, disamping itu pun pemerintah masih memandang disabilitas sebagai permasalahan kesehatan, tanpa meninjau aspek pendidikan dan perlakuan yang diterima oleh penyandang disabilitas, pemerintah kecamatan lebih menyerahkan permasalahan tersebut kepada Dinas Sosial dan RBM yang lebih sering bersentuhan langsung dengan penyandang disabilitas.

**8) Memanfaatkan dan menciptakan peluang tata kelola (*Exploiting or creating governance opportunities*)**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menila bahwa untuk dapat menciptakan peluang tata kelola adaptif dalam pelayanan disabilitas bukan merupakan hal yang mudah. Perlu adanya intervensi kolektif yang mesti mendukung tewujudnya tata kelola tersebut. Pemerintah kecamatan dalam hal ini memiliki keterbatasan untuk dapat mengadopsi program RBM atau layanan disabilitas lainnya. Hal ini karena pemerintah kecamatan sendiri memiliki keterbatasan dalam penentuan program dan kuasa anggaran. Dalam penentuan apa saja yang menjadi prioritas utama untuk dimasukan ke dalam program kerja kecamatan, program tersebut mesti melewati tahapan administratif serta melibatkan masyarakat. Program tersebut harus diajukan ditingkat bawah dan terus di dorong agar dapat menjadi program kerja daerah, sehingga pemerintah kecamatan dalam menjalankan program kerja tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam hal menciptakan tata kelola adaptif dalam pelayanan disabilitas di Kecamatan Mangkubumi, komunitas RBM di tingkat kelurahan di dorong agar dapat ikut serta dalam agenda musrembang di tingkat kelurahan nya masing masing, dan memasukan agenda RBM ke dalam draf susunan musrembang yang selanjutnya di bahas di tingkat kecamatan. Untuk di Kecamatan Mangkubumi masih belum terdapat kelurahan yang dalam agenda pembangunannya memuat mengenai pelayanan disabilitas, sehingga untuk di tingkat kecamatan sendiri tidak memiliki

kuasa untuk memasukan program tersebut untuk ke dalam program kerja kecamatan.

Namun dalam hal menciptakan peluang pelayanan disabilitas, Dinas Sosial dalam hal ini Sub bagian Remaja, Lansia dan Disabilitas sedang memproses rancangan peraturan daerah tentang disabilitas, sejauh ini pemerintah Kota Tasikmalaya masih belum memiliki peraturan daerah terkait pelayanan dan penanganan disabilitas di Kota Tasikmalaya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Remaja, Lansia dan Disabilitas Dinas Sosial Kota Tasikmalaya bahwa rancangan peraturan daerah tersebut telah di proses dan baru di bahas sebanyak dua kali, perlu beberapa kali pembahasan agar rancangan peraturan daerah tersebut di sahkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan adaptive governance dalam pelayanan disabilitas telah berjalan dengan baik, meskipun dari sisi lain masih perlu peningkatan dan penguatan lembaga formal dan informal dalam menangani isu disabilitas di Kecamatan Mangkubumi dengan cara berkolaborasi, dan mendorong ada nya tata kelola yang responsive dan inklusif terhadap penyandang disabilitas.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Abrahamsz, J., & Lopulalan, Y. (2019). Social-ecological system status and its implications for coastal and small islands management planning in Tanimbar Islands, Maluku Province,

Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and ...*

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/348/1/012137/meta>

Akamani, K. (2020). Integrating deep ecology and adaptive governance for sustainable development: implications for protected areas management. *Sustainability*. <https://www.mdpi.com/771654>

Assche, K. Van, Gruezmacher, M., & Beunen, R. (2022). Shock and Conflict in Social-Ecological Systems: Implications for Environmental Governance. *Sustainability*. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/2/610>

Assche, K. Van, Verschraegen, G., & ... (2019). The social, the ecological, and the adaptive. Von Bertalanffy's general systems theory and the adaptive governance of social-ecological systems. *Systems Research* .... <https://doi.org/10.1002/sres.2587>

Bryndum-Buchholz, A., Tittensor, D. P., & ... (2021). The status of climate change adaptation in fisheries management: Policy, legislation and implementation. *Fish and Fisheries*. <https://doi.org/10.1111/faf.12586>

Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli Inklusif Kolaboratif* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.

Echaubard, P., Thy, C., Sokha, S., Srun, S., & ... (2020). Fostering social innovation and building adaptive capacity for dengue control in Cambodia: a case study. *Infectious Diseases of ...*

- <https://doi.org/10.1186/s40249-020-00734-y>
- Edelmann, H., Quiñones-Ruiz, X. F., & ... (2020). Social learning in food quality governance—evidences from geographical indications amendments. In ... *Journal of the ... thecommonsjournal.org*.  
<https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.5334/ijc.968/print/>
- Edwards, P., Sharma-Wallace, L., Wreford, A., & ... (2019). Tools for adaptive governance for complex social-ecological systems: a review of role-playing-games as serious games at the community-policy interface. In *Environmental ... iopscience.iop.org*.  
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab4036/meta>
- Epstein, K., Wood, D. J., Roemer, K., Currey, B., Duff, H., & ... (2021). Toward an urgent yet deliberate conservation strategy: sustaining social-ecological systems in rangelands of the Northern Great Plains, Montana. *Ecology and ...*  
<https://par.nsf.gov/biblio/10229938>
- Folke, C. (2019). Governing for emergence in social–ecological systems. *Global Challenges, Governance, and Complexity*.  
<https://www.elgaronline.com/abstract/edcoll/9781788115414/9781788115414.00011.xml>
- Fox, C. A. (2021). *Anticipating future environments: climate change, adaptive restoration, and the Columbia River Basin*. JSTOR.
- Greenhill, L., Kenter, J. O., & Dannevig, H. (2020). Adaptation to climate change–related ocean acidification: an adaptive governance approach. *Ocean & Coastal Management*.  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120300867>
- Grüsgen, F. (2020). Adapting together in times of climate change: the potential of adaptive governance for improving the cooperation between reindeer herders and forest owners in .... In *Master Thesis Series in Environmental Studies and ... lup.lub.lu.se*.  
<https://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9012097/file/9012149.pdf>
- May, C. K. (2022). Complex adaptive governance systems: a framework to understand institutions, organizations, and people in socio-ecological systems. In *Socio-Ecological Practice Research*. Springer.  
<https://doi.org/10.1007/s42532-021-00101-7>
- MAZZEO, N. (n.d.). Water governance for adaptation and resilience in the Anthropocene. In *A SCIENCE-POLICY APPROACH*. researchgate.net.  
[https://www.researchgate.net/profile/Guarany-Osorio/publication/346355432\\_Economics\\_strategies\\_and\\_public\\_policies\\_for\\_climate\\_change\\_adaptation/links/5fd2236492851c00f8639909/Economics-strategies-and-public-policies-for-climate-change-adaptation.pdf#page](https://www.researchgate.net/profile/Guarany-Osorio/publication/346355432_Economics_strategies_and_public_policies_for_climate_change_adaptation/links/5fd2236492851c00f8639909/Economics-strategies-and-public-policies-for-climate-change-adaptation.pdf#page)
- McGlynn, B. (2022). *An Examination of Collaborative Governance for Complex Adaptive Systems in the St. John River Basin*.

- dr.library.brocku.ca.  
<https://dr.library.brocku.ca/handle/10464/15589>
- Mumtaz, M., & Ali, S. H. (2019). Adaptive governance and sub-national climate change policy: A comparative analysis of Khyber Pukhtunkhawa and Punjab provinces in Pakistan. In *Complexity, Governance & Networks*. researchgate.net. [https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Mumtaz-14/publication/336982495\\_Adaptive\\_Governance\\_and\\_Sub-national\\_Climate\\_Change\\_Policy\\_A\\_Comparative\\_Analysis\\_of\\_Khyber\\_Pukhtunkhawa\\_and\\_Punjab\\_Provinces\\_in\\_Pakistan/links/5dbd16aca6fcc2128f8f695/Adaptive](https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Mumtaz-14/publication/336982495_Adaptive_Governance_and_Sub-national_Climate_Change_Policy_A_Comparative_Analysis_of_Khyber_Pukhtunkhawa_and_Punjab_Provinces_in_Pakistan/links/5dbd16aca6fcc2128f8f695/Adaptive)
- Nahar, A., & Mishra, A. K. (2019). Green governance-a stepping stone for sustainable development. *Think India Journal*. <https://thinkindiaquarterly.org/index.php/think-india/article/view/18836>
- Porras, G. I. L. (2019). *Towards adaptive water governance in dryland social-ecological systems: the case of the Rio del Carmen watershed*. etheses.whiterose.ac.uk. <https://etheses.whiterose.ac.uk/25128/>
- Rechkemmer, A. (2021). Adopting an adaptive governance paradigm to advance climate law and policy in the MENA region. *Climate Change Law and Policy in the Middle ...*. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003044109-19/adopting-adaptive-governance-paradigm-advance-climate-law-policy-mena-region-andreas-rechkemmer>
- Ronald D. Brunner, T. A. S., Lindy Coe-Juell, C. M. C., & Christine M. Edwards, and D. W. T. (2005). *No Title*. columbia university press new york.
- Rusnaedy, Z., Haris, A., Congge, U., & ... (2021). Adaptive Climate Change Governance in Makassar, Indonesia. In *Journal of ...*. researchgate.net. [https://www.researchgate.net/profile/Zaldi-Rusnaedy/publication/357458447\\_Adaptive\\_Climate\\_Change\\_Governance\\_in\\_Makassar\\_Indonesia/links/61d4e105da5d105e551ceba6/Adaptive-Climate-Change-Governance-in-Makassar-Indonesia.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Zaldi-Rusnaedy/publication/357458447_Adaptive_Climate_Change_Governance_in_Makassar_Indonesia/links/61d4e105da5d105e551ceba6/Adaptive-Climate-Change-Governance-in-Makassar-Indonesia.pdf)
- Sharma-Wallace, L., Velarde, S. J., & Wreford, A. (2018). Adaptive governance good practice: Show me the evidence! *Journal of Environmental Management*, 222(November 2017), 174–184. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.05.067>
- Tulaeva, S. A. (2022). Sustainable Development Governance in the Arctic Regions (Review of International Approaches and Research). *Administrative Consulting*. <https://ideas.repec.org/a/acf/journal/y2022id1776.html>
- Vasseur, L. (2021). How ecosystem-based adaptation to climate change can help coastal communities through a participatory approach. *Sustainability*. <https://www.mdpi.com/1007016>

- Wallrapp, C., Keck, M., & Faust, H. (2019). Governing the yarshagumba “gold rush”: a comparative study of governance systems in the Kailash Landscape in India and Nepal. In *international Journal of the ... thecommonsjournal.org*.  
<https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.884/print/>
- Zia, A. (2019). Adaptive Governance of Coupled Social-Ecological Systems: Introduction to the Special Issue Themes. In *Complexity, Governance & Networks*.  
[pdfs.semanticscholar.org.  
https://pdfs.semanticscholar.org/e4a4/60a3e9d6a4b1f325f3433c77371453151a20.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/e4a4/60a3e9d6a4b1f325f3433c77371453151a20.pdf)